

PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA SKPD DI PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU

Asrini

Asrinisyp@Yahoo.Com

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to identify and analyze the Influence of Public Accountability, Goal Clarity Budget and Participation on Performance Budgeting SKPD Palu City Government. This research method using descriptive verification approach, the respondent is Pimpinan SKPD in Palu City Government as many as 86 people. Methods of data analysis in this research is multiple linear regression analysis using a hypothetical test significant level $\alpha = 0.05$ or $\alpha < 0.05$, Using SPSS version 16.00. The research proves that the value of Adjusted R-Square = 0.614 or 61.40% dependent variable is influenced by three variables are free, the rest of the independent variables is affected by other variables not studied, with the equation $Y = 1.569 + 0,272X1 + 0,188X2 + 0,204X3$ means the independent variables were analyzed in the form of a variable (X1, X2, and X3) to influence the dependent variable (Y) regression analysis model the performance of the SKPD in the city of Palu, where public accountability (X1) with tvalue 0.272 this translates into influence positive between public accountability and the performance of the SKPD. Budget goal clarity (X2) with 0.188 tvalue this means there is a positive influence between budget goal clarity and performance of the SKPD. Participation budgeting (X3) with 0.204 tvalue this means there is a positive influence between budgeting participation with the performance.

Keywords: *Public Accountability, Goal Clarity Budgeting Budget and Participation. performance SKPD.*

Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah membawa banyak perubahan besar, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun penyelenggaraan pemerintahan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa dampak perubahan yang mendasar dan cukup signifikan dalam sisi pemerintahan yaitu diberlakukannya otonomi daerah.

Undang - undang nomor 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana dimaksud untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah dibidang fiskal, sebagai pelaksana dari undang – undang tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang terakhir di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemberlakuan otonomi daerah tersebut ditandai dengan adanya penyerahan, pelimpahan dan penugasan sebagian kewenangan pemerintah pusat ke daerah, salah satu kewenangan yang diserahkan tersebut adalah dalam hal pengelolaan keuangan. Dengan adanya diserahkannya kewenangan pengelolaan keuangan tersebut memberi dampak bagi pemerintah daerah untuk lebih leluasa dalam mengelola keuangan daerah untuk pelaksanaan pembangunan di daerah, namun penyerahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah tersebut harus berdasarkan pada prinsip-

prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Hal ini menegaskan dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal, dengan demikian akuntabilitas publik mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Pada umumnya ada permasalahan pemerintah daerah yaitu ketidakefektifan, infisiensi dan privat imarent (penggunaan dan untuk kepentingan individu). Hal ini disebabkan karena tidak terdapat mekanisme dasar pertanggungjawaban yang baku seperti organisasi bisnis.

Organisasi pemerintahan tidak mengenal kepemilikan (*self interest*) yang dapat memaksakan pencapaian tujuan. Pemerintah daerah juga tidak mementingkan faktor persaingan yang seringkali digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi. Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah, sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009:21), yang mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik.

Penyusunan anggaran publik merupakan suatu proses yang cukup rumit. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor privat. Anggaran pada sektor privat merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik. Sebaliknya pada sektor publik, anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan untuk mendapat masukan.

Sastrohadiwiryo (2003: 231) mendefinisikan penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen/penyedia penilai untuk menilai kinerja tenaga

kerja dengan cara membandingkan kinerja dengan kinerja atas uraian/deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu biasanya setiap akhir tahun. Siagian (2003 : 41) menekankan bahwa penilaian merupakan upaya pembandingan antara hasil yang nyata dicapai setelah satu tahap tertentu selesai dikerjakan dengan hasil yang seharusnya dicapai untuk tahap tersebut.

Menurut Gomes (2003 : 135) penilaian kinerja mempunyai tujuan untuk *me-reward* kinerja sebelumnya (*to reward past performance*) dan untuk memotivasi demi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang (*to motivate future performance improvement*), serta informasi-informasi yang diperoleh dari penilaian kinerja ini dapat digunakan untuk kepentingan pemberian gaji, kenaikan gaji, promosi, pelatihan dan penempatan tugas-tugas tertentu.

Bastian (2006:274), Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja juga merupakan bagian dari sistem pengendalian yang dapat diketahui dari tingkat efisiensi dan efektifitas suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja adalah kemampuan manajer dalam melaksanakan kegiatan manajerial, antara lain : perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, supervisi, pengaturan staf (*staffing*), negosiasi dan representasi. Secara keseluruhan, kinerja merupakan penghargaan, jika diartikan sebagai penyatuan tiga variabel yang saling berhubungan, yaitu perilaku (proses), hasil, dan pengeluaran.

Dessler (1998 : 536) mengemukakan bahwa penilaian kinerja (*performance appraisal*) memainkan peranan yang sangat

penting dalam peningkatan motivasi ditempat kerja. Karyawan menginginkan dan memerlukan balikan berkenaan dengan prestasi mereka dan penilaian menyediakan kesempatan untuk memberikan balikan kepada mereka. Jika kinerja tidak sesuai dengan standar, maka penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau kemajuan karyawan dan untuk menyusun rencana peningkatan kinerja.

Mahsun (2006:198), mengungkapkan bahwa: pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing satuan kerja yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya, setiap satuan kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri, dengan demikian perumuan indikator kinerja tidak bisa seragam untuk diterapkan pada semua Satuan Kerja yang ada, namun demikian, dengan pengukuran kinerja setiap satuan kerja ini harus tetap dimulai dari pengidentifikasian visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, program, anggaran serta tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif verifikatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel yang dapat diketahui hubungan variabel satu dengan variabel lain dengan menggunakan alat regresi linear berganda

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai hasil analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan bantuan komputer SPSS For Wind Release 16,0 diperoleh hasil-hasil penelitian dari 86 orang responden dengan dugaan pengaruh kedua variabel independen (akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran) terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Palu dapat diketahui hasil perhitungan sebagai berikut:

Hasil Perhitungan Regresi Berganda

Dependen Variabel Y = Kinerja SKPD				
Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	t	Sig
C = Constanta	1,569	0,205	7,652	0,000
X1 = Akuntabilitas	0,272	0,053	5,108	0,000
X2 = Kejelasan	0,188	0,041	4,617	0,000
X3 = Partisipasi	0,204	0,045	4,582	0,000
R- = 0,792				
R-Square = 0,628		F-Statistik = 46.072		
Adjusted R-Square = 0,614		Sig. F = 0,000		

Sumber: Hasil Regresi

Model regresi yang diperoleh dari tabel diatas adalah:

$$Y = 1,569 + 0,272X_1 + 0,188X_2 + 0,204X_3$$

Persamaan diatas menunjukkan, variabel independen yang dianalisis berupa variabel (X₁, X₂, dan X₃) memberi pengaruh terhadap variabel independen (Y) model analisis regresi kinerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah di Kota Palu dapat dilihat sebagai berikut:

1. Untuk nilai constanta sebesar 1,569 berarti kinerja pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Palu sebelum adanya variabel independen adalah sebesar 1,569.

2. Akuntabilitas publik (X_1) dengan koefisien regresi 0,272 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara akuntabilitas publik dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Artinya semakin baik akuntabilitas publik yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Palu maka akan menaikkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Kejelasan sasaran anggaran (X_2) dengan koefisien regresi 0,188 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara kejelasan sasaran anggaran dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Artinya semakin baik kejelasan sasaran anggaran yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Palu maka akan menaikkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Partisipasi penyusunan anggaran (X_3) dengan koefisien regresi 0,204 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Artinya semakin baik partisipasi penyusunan anggaran yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Palu maka akan menaikkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Palu.

Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota Palu

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Akuntabilitas Publik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Dalam sistem pelaporan yang baik diperlukan akuntabilitas agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja SKPD. Laporan umpan balik (*Feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana. Sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan baik rencana atau pencapaian sasaran anggaran. Pemerintah selaku pengelola dana public harus mampu

menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya (Kusumaningrum, 2010).

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan Masyarakat. Masyarakat hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002). Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja SKPD, untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja harus ada pihak eksternal dan internal dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja, menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas publik. Kinerja pemerintah harus menerapkan akuntabilitas yang transparan dan terukur agar mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Kejelasan sasaran anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota Palu

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Sejalan yang dikemukakan oleh Kenis (1979), bahwa kejelasan sasaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran harus dinyatakan secara jelas, spesifik dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Locke (1968) dalam Kenis (1979) menyatakan bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif dari pada tidak menetapkan tujuan spesifik. Hal ini akan

mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang akan dikehendaki sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan kinerja.

Syafril (2009) menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Locke(1968) dalam Kenis (1979) mengatakan kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa harus ada sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target – target yang telah di ditetapkan.

Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota Palu

Dari hasil penelitian Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD di Pemerintah daerah Kota Palu. Hal ini memberikan implikasi bahwa penyusunan anggaran yang diukur dari indikator melibatkan bawahan, memberikan kesempatan bawahan memberikan informasi dan berkontribusi dalam penyusunan anggaran sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah Kota Palu yang artinya pada partisipasi penyusunan anggaran sumbangsi indikator yang paling tinggi yaitu dari keterlibatan setiap kepala bagian dalam penyusunan anggaran.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran pada dasarnya yang terjadi di instansi pemerintah daerah terlaksana dengan baik, dimana dalam penyusunan anggaran pimpinan selalu melibatkan bawahan, sukses

atau tidak sebuah kegiatan yang turut andil adalah bawahan karena mereka yang lebih mengetahui program pelaksanaan kegiatan pada umumnya.

Bawahan yang dimaksud disini bersifat “bottom-up” setiap kepala dinas dalam penyusunan anggaran melibatkan setiap kepala bagian kemudian kepala bagian mendiskusikan kepada masing-masing staf olehnya kebutuhan atau penyusunan anggaran yang dilakukan tepat sasaran sehingga kinerja yang terlaksana mulai dari penganggaran sampai dengan penggunaan anggaran dapat dipertanggung jawabkan oleh masing-masing dinas dan staf juga secara tidak langsung selalu memberikan informasi dan bersikap terbuka atas kepercayaan setiap kepala dinas yang di berikan, sehingga menghasilkan kinerja yang baik.

Berdasarkan hasil dan wawancara yang dilakukan nampak bahwa dalam proses penyusunan anggaran masih ada beberapa kekurangan salah satunya Banyaknya kesempatan yang diberikan kepada bawahan masih sangat kurang akurat untuk memaksimalkan penyusunan anggaran. Kurang maksimalnya dikarenakan kadangkala penyusunan anggaran sering terjadi perubahan dalam proses pelaksanaan apalagi peraturan pemerintah yang selalu berubah, olehnya keterkaitan antara peraturan pemerintah dengan implementasinya selalu mengalami hambatan olehnya beberapa staf harus butuh penyesuaian diri untuk memaksimalkan kinerja pegawai seperti proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan yang paling penting dalam partisipasi penyusunan anggaran. Dalam partisipasi penyusunan anggaran dinas/badan dan kantor di lingkungan pemerintah daerah Kota Palu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan selalu melibatkan bawahan, hendaknya dipertahankan dalam penyusunan partisipasi penyusunan anggaran melibatkan setiap bawahan untuk memenuhi kebutuhan apa yang akan dilakukan selama satu tahun.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Palu, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD di Pemerintah Kota Palu hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian.
- 2) Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD di Pemerintah Kota Palu
- 3) Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD di Pemerintah Kota Palu
- 4) Penyusunan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Kota Palu.

Rekomendasi

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa penerapan akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja SKPD di Kota Palu telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.
2. Dalam implementasi atau pelaksanaan anggaran Pemerintah Kota Palu sebaiknya lebih mengevaluasi pelaksanaan dengan menerapkan pengendalian akuntansi yang lebih ketat untuk pelaksanaan dan memperbaiki kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Dalam Akuntabilitas publik, Kejelasan sasaran anggaran, Partisipasi penyusunan anggaran berkaitan dengan kinerja SKPD di Pemerintah Kota Palu harus ditingkatkan lagi dan perlu mendapatkan perhatian lebih. Karena variabel diatas

dibeberapa instansi terdapat permasalahan internal jika tidak di beri perhatian khusus akan berdampak pada laporan keuangan SKPD dan Laporan keuangan Pemerintah Kota Palu.

4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian tentang Kinerja SKPD dengan menggunakan variabel lainnya seperti pengawasan, stuktur organisasi, Komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, peraturan - peraturan daerah terhadap kinerja SKPD di Kota Palu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan Jurnal ini, tidak dapat terselesaikan tanpa adanya arahan dari tim pembimbing, karena itu penulis melalui kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada Prof. Dr. H. Djayani Nurdin, S.E., M.Si selaku pembimbing Utama yang memberikan bimbingan, arahan dan saran yang tak ternilai yang harganya untuk penulisan jurnal ini. Demikian pula kepada Dr. Vita Yanti Fattah, S.E M.Si sebagai pembimbing anggota yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan, bimbingan, petunjuk dan saran serta motivasi agar penulis menyelesaikan jurnal ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Agnes (2014) Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah dengan Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi empiris pada Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Palu)
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2009, Modul Diklat Sistem. Pengendalian Intern Pemerintah, Jakarta

- Bangun, 2006. a Critical Review and Research Agenda. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 13: 3 pp. 367-394
- Bangun, Andarias. 2009. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang). (Tesis).Medan: Program Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harefa, Kornelius., *Analisis Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah*. Universitas Sumatera Utara, Medan
- Harefa, Kornelius., *Analisis Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah*. Universitas Sumatera Utara, Medan
- Industrial Relations*". Pp 97-110
- Kenis, I. 1979. Effect on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*, Vol. LIV, No. 4, pp: 707-
- Luthans, Fred. 2001, *Organizational Behaviour*, Ninth Edition, International Edition, Mc Graw Hill Company, New York.
- Mahoney, Thomas A. Thomas H. Jerdee. And Stephan J. Carol, 1963, " *Development of Managerial Performance a Research Approach*, "Southwestern Publishing
- Mahoney, Thomas A. Thomas H. Jerdee. And Stephan J. Carol, 1965, " *The Job Management*,
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama.Penerbit Andi.Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama.Penerbit Andi.Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kelima. Penerbit andi Yogyakarta.